

**KAJIAN SISTEM AKTIVITAS DAN KERUANGAN WILAYAH BANDUNGAN
DALAM UPAYA PENERAPAN KONSEP AGROPOLITAN
DI KABUPATEN SEMARANG**

**TUGAS AKHIR
TKP - 477**

OLEH

**DWI ISTIANTO
L2D 302 379**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG, 2005**

ABSTRAKSI

Perubahan paradigma pembangunan diantaranya dengan terselenggaranya otonomi daerah memberikan pemerataan diberbagai sektor pembangunan karena kekuatan otonom terletak di daerah (desentralisasi) dan bukan di pusat (sentralistik). Kekuatan hegemoni tidak hanya di wilayah maju/kota, tetapi setiap wilayah atau desa diberi keleluasaan untuk berkembang. Peluang kemandirian semakin terbuka bagi daerah atau wilayah untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan kemampuan lokalitas atau karakteristik sumber daya alam, manusia dan teknologi wilayah. Melalui penerapan konsep agropolitan sebagai pemacu perkembangan wilayah terutama melalui sektor pertanian diharapkan mampu mengurangi kesenjangan atau dikotomi desa dengan kota dewasa ini. Pendekatan agropolitan merupakan sebuah konsep yang menekankan pada peningkatan dan pengembangan kegiatan pertanian dan keruangan. Percepatan ini dimulai dengan mendorong perkembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing serta berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi.

Keberadaan wilayah Bandungan sebagai salahsatu sentra pertanian Kabupaten Semarang memberikan keuntungan besar dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian ini didukung oleh adanya fenomena perkembangan produktifitas yang cukup tinggi pada sektor pertanian khususnya untuk komoditas tanaman pangan. Namun di satusisi perkembangan sektor pertanian tanaman pangan di Bandungan mengalami stagnasi dan bahkan menurun. Hal ini terjadi karena belum terciptanya sinergitas sistem pembangunan pertanian yang meliputi pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Sehingga kebijakan pengembangan wilayah yang berbasis sektor pertanian belum sepenuhnya teradopsi dalam konteks pembangunan sesungguhnya.

Berdasarkan hal diatas, adanya kerangka teoritis yang mendasari penerapan kawasan agropolitan memberikan batasan mengenai variabel penelitian. Dari hal tersebut kemudian akan secara utuh dapat di lihat pada kenyataan yang terjadi di wilayah studi yaitu Bandungan. Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peluang Bandungan terhadap penerapan konsep agropolitan Kabupaten Semarang. Oleh karena itu penekanan isu terhadap kajian sistem aktivitas dan keruangan wilayah Bandungan merupakan salahsatu bagian dari konsepsi ini. Dan pada akhirnya akan diketahui implikasi sistem aktivitas dan keruangan wilayah Bandungan dalam upaya penerapan konsep agropolitan. Sehingga pengembangan aktivitas pertanian dan keruangan wilayah Bandungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan akan menjadi lebih nyata.

Kata Kunci :Sistem Aktivitas,Keruangan, agropolitan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengembangan Sektor Pertanian Melalui Konsep Agropolitan

Terselenggaranya otonomi daerah memberikan pemerataan pembangunan karena kekuatan otonom terletak di daerah (desentralisasi) dan bukan di pusat (sentralistik). Kekuatan hegemoni tidak hanya di wilayah maju/kota, tetapi setiap wilayah atau desa diberi keleluasaan untuk berkembang. Peluang kemandirian semakin terbuka bagi daerah atau wilayah untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan kemampuan lokalitas atau karakteristik sumber daya alam, manusia dan teknologi wilayah.

Menurut data statistik tahun 2001 mengenai persentase tenaga kerja berdasarkan bidang usaha di Indonesia, jumlah tenaga kerja terbesar berada pada sektor pertanian dengan persentase sebesar 43,77% diikuti oleh sektor perdagangan dengan persentase sebesar 19,24%, sektor industri sebesar 13,31%, sektor jasa sebesar 12,12% dan beberapa sektor lain sebesar 11,56% (Statistik Indonesia, 2001). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang paling dominan dan memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia berupa penyediaan pangan, penghasil tenaga kerja dan pangsa pasar bagi hasil produksi industri pertanian. Terlebih hampir sebagian besar penduduk Indonesia masih berada di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian masih merupakan kegiatan utama pedesaan. Tetapi di sisi lain sektor ini justru memiliki laju pertumbuhan yang paling lambat dibandingkan dengan sektor-sektor lain khususnya sektor industri dan jasa. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh tidak adanya keterkaitan antar subsistem pembangunan pertanian.

Selain itu sebagian besar tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja yang bergerak di sektor industri atau jasa sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas kegiatan pertanian (Sukirno, 1994:498). Dan apabila berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi involusi produksi pertanian yang berlanjut pada penurunan pertumbuhan ekonomi pedesaan sebagai wilayah yang berbasis pada aktivitas pertanian.

Kemudian untuk mengatasi hal tersebut muncul suatu pendekatan dalam mengembangkan kegiatan pembangunan pertanian yang menekankan pada peningkatan aktivitas dan keruangan, yaitu melalui pendekatan konsep agropolitan. Pengembangan wilayah agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota. Percepatan ini dimulai dengan mendorong perkembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing serta berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi di wilayah agropolitan.

Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela, kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Soenarno, 2003). Sedangkan wilayah agropolitan merupakan sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hierarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk suatu wilayah sentra pertanian (Friedmann dan Douglass, 1975).

Pengembangan wilayah pedesaan melalui agropolitan ditafsirkan sebagai perubahan daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (urbanism) ke wilayah pedesaan yang telah disesuaikan pada lingkungannya (Friedmann dan Douglass, 1975). Oleh karena itu pada wilayah agropolitan diharapkan adanya suatu proses pengkotaan¹, terutama dalam penyediaan sarana-prasarana penunjang sektor pertanian.

1.1.2 Konsep Agropolitan Dalam Konteks Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang sebagai wilayah agropolitan pertama di Jawa Tengah² memiliki potensi sektor pertanian yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan luas lahan di Kabupaten Semarang sebesar 73,88% yang digunakan untuk usaha pertanian. Potensi ini didukung oleh kelengkapan sarana penunjang untuk menggerakkan sektor agribisnis seperti Terminal Agribisnis di Desa Jetis Kecamatan Ambarawa, perluasan pasar sayur-mayur Jimbaran, laboratorium sayur maupun buah-buahan, dan modernisasi alat-alat pertanian. Keunggulan lainnya adalah dalam produk sayur-sayuran dan buah-buahan,

¹ Pengkotaan disini tidak melulu pada perubahan spasial wilayah desa menjadi struktur ruang kota, tetapi lebih menekankan pada ketersediaan sarana prasarana kota serta perubahan gaya hidup masyarakatnya (negatif maupun positif)

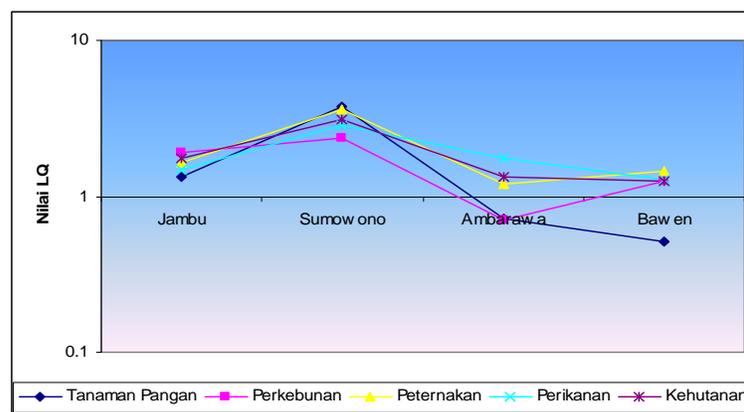
² Penetapan Kabupaten Semarang menjadi salahsatu wilayah agropolitan terjadi pada tahun 2001 lalu oleh Menteri Pertanian karena potensi agribisnis yang dimiliki sangat besar (Kompas, 06 Februari 2003).

seperti pada beberapa komoditas unggulan yaitu durian nangka, kelengkeng, salak lumut, salak pondoh dan salak lokal, serta buah waluh; dan aneka sayuran seperti wortel, tomat, bawang daun, selederi, kentang, cabai, dan petai. Sedangkan untuk produk padi dan palawija, total produksi per tahun sekitar 300.000 ton per tahun³. Peranan sektor pertanian sebagai sektor unggulan seperti yang terdapat di Kabupaten Semarang merupakan syarat utama dalam membentuk sebuah wilayah agropolitan.

Salahsatu wilayah penghasil komoditas pertanian Kabupaten Semarang yang cukup signifikan terdapat di wilayah Bandungan. Perkembangan sentra pertanian Bandungan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada upaya penerapan agropolitan. Dari beberapa sub sektor pertanian wilayah Bandungan ternyata kontribusi paling besar adalah sub sektor tanaman pangan. Perkembangan sub sektor tanaman pangan cukup mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat.

Selain itu perkembangan aktivitas pertanian tanaman pangan juga mempengaruhi perkembangan sub sistem pertanian lainnya. Seperti kemampuan dalam memasarkan produk ke berbagai wilayah di Kabupaten Semarang dan wilayah di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Salatiga, Kendal dan Magelang dan bahkan sampai ke Jakarta dan pulau Kalimantan. Kemampuan ini didukung oleh adanya sarana prasarana pendukung pertanian, kemampuan inovasi terhadap produk pertanian, dan sistem transportasi yang memadai.

GAMBAR 1.1
NILAI LQ SEKTOR PERTANIAN WILAYAH BANDUNGAN TAHUN 2001



Sumber: *Buku Rencana Pengembangan kawasan Agropolitan Pada Kapet Bandungan Kabupaten Semarang*

³ Kompas, 06 Februari 2003